Islam Nusantara: Islam & Nasionalisme

Efi Afifi

STAI Wasilatul Falah Rangkasbitung Banten

efiafifi132@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian society has experienced a positive historical flow in building their national spirit. The national awakening that occurred in the 20th century was marked by resistance and struggle against colonialism and colonialism to liberate Indonesia. And in the historical record, Muslims with their nationalist spirit have a very large role and contribution in liberating and forming the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The spirit of nationalism of religious leaders (ulama) in the pre-independence period was also the substance of the idea of Nusantara Islam. In the idea of Islam Nusantara, there are at least two major and major issues; First, is the issue of the relationship between Islam and local culture, which provoked the emergence of the term indigenization of Islam and this is the main and most central issue of this much-talked-about Nusantara Islam discourse. So there are not a few assumptions, that Islam Nusantara is part of an effort to localize universal Islam and even demean Islam itself. This assumption is certainly not correct, when referring to the main substance of Nusantara Islam, which has actually been carried out by the guardians in spreading Islam in the archipelago. Second, is the issue of Islam and Nationalism or Islam and the State. The second issue is no less provoking debate both in the academic and non-academic worlds.

Keywords : nasionalisme 1; kebangkitan 2; nusantara 3.

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia mengalami alur historis yang positif dalam membangun jiwa kebangsaannya. Kebangkitan nasional yang terjadi pada abad 20 yang ditandai dengan perlawanan dan perjuangan terhadap penjajah dan kolonialisme untuk membebaskan negeri Indonesia. Dan dalam catatan sejarah umat Islam dengan jiwa nasionalismenya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam memerdekakan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Spirit nasionalisme para tokoh agama (ulama) di masa pra kemerdekaan inilah yang juga menjadi substansi gagasan Islam Nusantara. Dalam gagasan Islam Nusantara ini, setidaknya ada dua isu besar dan utama; pertama, adalah isu hubungan Islam dan budaya lokal, yang memancing munculnya istilah pribumisasi Islam dan inilah isu utama dan paling sentral dari diskursus Islam Nusantara yang ramai dibicarakan ini. Sehingga tidak sedikit anggapan, bahwa Islam Nusantara merupakan bagian dari upaya melokalkan Islam yang universal bahkan dianggap merendahkan Islam itu sendiri. Anggapan ini tentu tidak tepat, jika merujuk kepada substansi pokok Islam Nusantara yang sesungguhnya telah dilakukan oleh para wali dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Kedua, adalah isu Islam dan Nasionalisme atau Islam

dan Negara. Isu yang kedua ini tidak kalah memancing perdebatan baik dalam dunia akademik maupun non akademik.

Kata kunci : nasionalisme 1; kebangkitan 2; nusantara 3.

PENDAHULUAN

Islam Nusantara mulai ramai dibicarakan semenjak *Nabdhatul Ulama* (NU) mengangkatnya sebagai tema dalam Mukhtamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada 1-5 Agustus 2015. Bagi NU sebagai ormas Islam terbesar, Islam Nusantara merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara dengan pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. Sehingga, Islam Nusantara sesungguhnya merupakan ciri khas, tipologi dan karakter Islam di Indonesia.

Diskusikan Islam Nusantara, jika kita telusuri lebih jauh merupakan spirit Ijtihad yang diajarkan Rasulullah SAW. Tatkala hendak mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai *qadli* (hakim) di Yaman, Rasulullah sempat melakukan wawancara dengannya. Rasul bertanya, "Apabila dihadapkan padamu pada kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?" Mu'adz menjawab, "saya akan memutuskan berdasar Kitabullah. Nabi bertanya lagi, "Bila tidak kau temukan di Kitabullah? Balas Mu'adz, "Saya akan berhukum dengan Sunnah Rasul. Nabi melanjutkan pertanyaannya, "Bagaimana jika tidak kau temukan di Kitabullah maupun di Sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab, "saya akan berijtihad berdasar pendapatku sendiri dengan sungguh-sungguh," Nabi lalu menepuk dada Mu'adz sebagai isyarat memberikan restu kepadanya.

Dalam literature Ushul Fiqh, riwayat diatas umumnya dipakai sebagai dalil tentang keabsahan status ijtihad dalam hukum Islam. Menurut Ahkmad Sahal (Sahal, 2015: 15), namun sesungguhnya ada pesan lain yang menarik untuk dicermati. Dengan bertanya ke Mu'adz bagaimana ia akan memutuskan perkara yang tidak ia temukan rujukannya di Qur'an maupun Hadis, Nabi secara implisit mengakui adanya kemungkinan muncul kasus-kasus hukum baru di wilayah baru di tempat di mana Nabi dan para sahabatnya tinggal. Nabi menyadari betapa lokasi yang terletak ribuan kilometer dari madinah seperti yaman berpotensi melahirkan kasus-kasus hukum yang tidak bisa ditemukan dalam Qur'an maupun hadis. Kalau pada masa Nabi saja Yaman, yang note bene masih termasuk kawasan Arab, bisa memunculkan keadaan-keadaan baru yang tak ada presedennya di Qur'an dan Sunnah, apalagi wilayah-wilayah lain yang letaknya lebih jauh lagi, lebih-lebih setelah Nabi wafat.

Misalnya konteks Indonesia di era sekarang. Umat Islam Indonesia hidup pada suatu masa yang terpaut ribuan tahun dari era Nabi, dan berada di suatu wilayah yang bukan hanya ratusan ribu kilometer jauhnya dari tanah Arab, tempat

asal nabi, melainkan juga mempunyai karakteristik budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda sama sekali dari Arab. Realitas keindonesiaan abad 21 adalah konteks baru yang membuka peluang bagi lahirnya persoalan-persoalan baru terkait hukum Islam yang bisa jadi tidak ditemukan rujukannya secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. Dari diskursus inilah, Islam Nusantara merupakan sebuah gagasan khas muslim Indonesia.

Dalam gagasan *Islam Nusantara* ini, menurut penulis setidaknya ada dua isu besar dan utama; *pertama*, adalah isu hubungan Islam dan budaya lokal, yang memancing munculnya istilah *pribumisasi Islam* dan inilah isu utama dan paling sentral dari diskursus Islam Nusantara yang ramai dibicarakan ini. Sehingga tidak sedikit anggapan, bahwa *Islam Nusantara* merupakan bagian dari upaya melokalkan Islam yang universal bahkan dianggap merendahkan Islam itu sendiri. Anggapan ini tentu tidak tepat, jika merujuk kepada substansi pokok Islam Nusantara yang sesungguhnya telah dilakukan oleh para wali dalam menyebarkan Islam di Nusantara. *Kedua*, adalah isu Islam dan Nasionalisme atau Islam dan Negara. Isu yang kedua ini tidak kalah memancing perdebatan baik dalam dunia akademik maupun non akademik.

Bagi penulis, konsep Islam dan Nasionalisme atau Islam dan negara dalam gagasan *Islam Nusantara* ini merupakan konsep yang menarik dan khas dari Islam Indonesia. Mengingat konsep *din wa daulah* (agama dan negara) menjadi tema-tema penting para ulama dan pembaharu di Timur Tengah yang memiliki peran dominan akhir-akhir ini, sebut saja; Hasan Al-Banna, Abu Al-A'la Al-Maududi, Sayyid Quthb, Yusuf Al-Qardhawi, dll. Nama-nama tersebut, sangat urgen dengan kemunculan organisasi atau partai politik yang sangat terpengaruh oleh pemikiran mereka.

Umum diketahui bahwa terdapat sebuah konsensus atau kesepakatan dalam merekatkan tali kebangsaan di Indonesia, yakni Pancasila. Konsep ini sudah barang tentu tidak banyak dibahas oleh ulama dan pembaharu Timur Tengah tersebut, dengan konteks dan keadaan yang berbeda dengan situasi disana. Maka Pancasila dan UUD 1945 adalah basis kekuatan Islam Nusantara dalam konteks keindonesiaan. Dimulai dari rumusan tidak adanya pertentangan antara Islam dan Pancasila, bahkan dinyatakan, sila-sila dalam Pancasila merupakan ajaran Islam, maka menerima, menjalankan dan membela Pancasila dihitung sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam. Pancasila juga bisa dianggap sebagai produk Islam Nusantara, karena sila-sila dalam Pancasila merupakan akulturasi ajaran Islam dengan budaya, bahasa, dan prioritas yang berasal dari konteks. Kalau Islam disebut sebagai dasar negara, maka, golongan-golongan di luar Islam dipastikan akan menentang, imbasnya adalah persatuan dan keutuhan bangsa terancam.

Masyarakat Indonesia mengalami alur historis yang positif dalam membangun jiwa kebangsaannya. Kebangkitan nasional yang terjadi pada abad 20 yang ditandai dengan perlawanan dan perjuangan terhadap penjajah dan kolonialisme untuk membebaskan negeri Indonesia. Dan dalam catatan sejarah umat Islam dengan jiwa nasionalismenya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam memerdekakan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Spirit nasionalisme para tokoh agama (*ulama*) di masa pra kemerdekaan inilah yang juga menjadi substansi gagasan *Islam Nusantara*.

Di samping itu, geo-politik Timur Tengah yang kian hari penuh dengan konflik dan peperangan. Ditambah dengan masih kuatnya imajinasi kaum muslim mengenai kekuasaan Islam yang secara simbolis runtuh. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif kasus imperium Turki Usmani yang pernah bertahan selama hampir tujuh abad, akhirnya tidak bisa mengelak dari "hukum besi sejarah". Imperium ini runtuh pada 1924, untuk tidak bangkit Kembali (Ma'arif, 2009: 299). Memori umat Muslim yang tidak pernah melupakan dan mengimajinasikan kejayaan imperium inilah yang menurut Khaled Abou El-Fadhl menjadi awal dari munculnya gerakan negara Islam disemua belahan dunia muslim. Tak terkecuali di Indonesia, masih ada kelompok umat Muslim yang memimpikan Indonesia menjadi Negara Islam, sehingga jargon-jargon *Khilafah* atau *Indonesia Milik Allah* sering kita temui. Berangkat dari inilah, isu *Islam dan Nasionalisme* menurut hemat penulis sangat relevan dan mendesak untuk dikaji serta dicari titik temunya, dan ini yang menjadi tema sentral dalam gagasan Islam Nusantara. Oleh karena itu, makalah ini hanya akan membatasi pembahasannya dalam tema sentral tersebut.

Geo Politik Timur Tengah: Ketegangan Islam dan Nasionalisme

Sejak berakhirnya Perang Dunia I, bangsa-bangsa Eropa secara praktis telah menjajah sebagian besar dunia Muslim: Inggris menguasai Mesir, Palestina, Trans-Jordan, Irak, Teluk Arab, Anak Benua India, dan Asia Tenggara; Prancis menguasai Afrika Barat dan Utara, Libanon dan Syria; dan Belanda menjajah Indonesia (Esposito, 1992: 51). Dominasi asing ini telah membangunkan kesadaran umat Islam, dan banyak di antara mereka yang merasakan perlunya respon dari umat Islam untuk menghentikan stagnasi dan meneruskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan modernisasi seperti yang telah dilakukan negara-negara Eropa.

Memasuki abad 20, sejarah mulai mencatat bangkitnya dua gerakan yang sangat berpengaruh di dunia Muslim kontemporer: (1) nasionalisme sekuler, yang berusaha memperoleh kemerdekaan dari para penguasa kolonial Eropa, dan berusaha untuk mengembangkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntutan abad modern, dan (2) gerakan Islam, yang memiliki tujuan

sama dengan nasionalisme sekuler, tetapi berbeda dalam cara bagaimana masyarakat harus di reformasikan.

Sebagaimana diketahui, pada akhir abad 19, kemunduran Kerajaan Usmani, sebagai penguasa dunia yang telah berlangsung kurang lebih selama lima ratus tahun, mulai digantikan. Kehadiran para penguasa kolonial Eropa dengan keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi dan militernya, mulai mendominasi kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Terkejut dengan keberhasilan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta militer Eropa, unsur-unsur dalam masyarakat Muslim berusaha mulai merespon ilmu pengetahuan dan teknologi mereka, dan rencana-rencana pembangunan pun diterapkan untuk memodernisasikan masyarakatnya. Usaha-usaha modernisasi ini telah dimulai pada awal abad 19 dalam bidang militer dan birokrasi oleh para penguasa Usmani (Esposito, 1991: 44).

Sejak dekade 1920-an sampai dekade 1950-an masing-masing negara di timur tengah hanyut kedalam pergolakan politik ganda masing-masing negara berusaha melepaskan diri (merdeka) dari penguasa kolonial Prancis atau Inggris, sedang dalam negeri mereka sendiri tengah berlangsung perebutan kekuasaan antara generasi konservatif lama dan beberapa kekuatan sosial yang sedang berkembang. Perjuangan ini menghasilkan kemerdekaan politik pada tahun 1940-an dan menyatukan antara krisis domestik dan krisis internasional mengalahkan kepemimpinan politik dan identitas idiologi pada dekade 1950-an.

Pada dekade 1920-an dan 1930-an para pemikir sosialisme Arab berusaha menampilkan eksistensi kebangsaan Arab, dalam teoritis dan filosofis. Mereka mendefinisikan kebangsaan ini pada aspek bahasa, sejarah dan budaya yang mampu mengatasi perpecahan masyarakat Arab kedalam berbagai suku, daerah, agama, dan negara. (Sati al-Husri / *ذ تاض رطحلا*) seorang pendidik asal Iraq, menyerukan kebutuhan akan kesatuan dan keharusan mengorbankan kepentingan agama (Primordial) menuju pada kebangsaan sebagai satu keutuhan (Lapidus, 2000: 147-149).

Pada awal 1940-an oleh gerakan militan (Ihya al-Arabi/ *ي ترعلا* / *ءاي حلا*) yang dipimpin oleh dua orang guru Damaskus, Michel Aflaq dan Salahuddin Baithar, serta filusuf Zaki al-Arsuzi dari Antiokia mendirikan (Partai Ba"th/ *ب سح ؤ ع ثلا* / *ب سح ؤ ع ثلا*) Sosialis Arab (Hizb al-Ba"ats al-Arabi al-Isytirak/ *ب سح ؤ ع ثلا* / *ب سح ؤ ع ثلا*). Partai ini mencanangkan revitalisasi, reunifikasi, dan liberalisasi "satu bangsa Arab yang mengemban misi Abadi" suatu ungkapan yang diilhami oleh Fichte sebagai tema perjuangannya, dan mencanangkan revolusioner untuk membalikan perjalanan sejarah. Idiologi nasional Ba"th berkembang ke arah yang berlawanan dengan Nasionalisme Eropa, Juga

menggunakan Fasisme Jerman dan Italia sebagai sumber. Ideologi bertumpu pada konsep bangsa arab yang didefinisikan bukan oleh ras, melainkan oleh realitas kultural (Ensiklopedi Dunia Islam Modern, 2001: 274).

Pada tahun 1952 Free Officer yang dipimpin oleh, Muhammad Naquib, Jamal Abdul Nasser, dan Anwar Sadat, menggulingkan raja dan mengakhiri rezim parlementer, dengan demikian perkembangan bangsa Mesir menuju kearah nasional dan sekuler, secara ideologis pemerintahan Free Officer dari liberalisme kepada sosialisme, dari kolaborasi kepada anti kolonialisme, dan dari Nasionalisme kepada Pan Arabisme untuk menggariskan tujuan pembangunan bangsa Mesir (Lapidus, 2000: 121-122). Inilah perkembangan kaum Nasionalisme di Mesir, yang cenderung sekuler dan sosialis berangkat dari pandangan Michael Aflach dan Ernest Renan.

Disamping itu, terjadi pula kebangkitan gerakan Islam yang bertujuan menegakan syari'at Islam di Mesir, yakni Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al Banna. Hasan Al-Banna menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara, Islam bahkan merupakan agama yang menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan. Sedangkan Daulah Islamiyah (Negara Islam) tegak diatas fondasi dakwah dan kaidah-kaidah syariat yang baku sebagaimana diperintahkan Allah. Dengan pandangan bahwa Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan (Ahmad, 1956: 18), Al Banna bahkan mengembangkan pandangan Islamisme (*Islamiyyah*), yang mempertautkan Islam dengan politik atau negara, serta memandang penting adanya pemerintahan Islam.

Sehingga Ikhwanul Muslimin sangat represif terhadap pemerintahan, yang kadang tidak disenangi Raja Farouk. Posisi Ikhwanul Muslimin kian berbahaya setelah muncul rumor bahwa abggota-anggota militant di tubuh organisasi tersebut sedang merencanakan kudeta terhadap pemerintahan Raja Farouk. Perdana Menteri Mahmoud al-Nukrashi Pasha kemudian membubarkan Ikhwanul Muslimin pada bulan Desember 1948. Inilah yang mendorong abdel Meguid Ahmed Hasan, anggota Ikhwanul Muslimin yang juga sebagai mahasiswa kedokteran hewan di Universitas King Fouad, melancarkan pembunuhan terhadap Pasha. Hassan menembak Pasha di gedung kementerian dalam Negeri, dan Pasha meninggal seketika. Karena ketegangan inilah sesungguhnya, pada 12 Februari 1949, Hasan Al Banna diserang dan ditembak oleh dua orang tak dikenal.

Sepeninggal Hasan Al Banna, generasi berikutnya adalah Sayyid Quthb. Menurut Sayyid Quthb ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang terdiri atas keimanan dan amal yang dibangun di atas prinsip ibadah hanya kepada Allah, bahkan ajaran tentang tauhid (prinsip ke-Esa an Tuhan) merupakan sistem kehidupan (*manhaj al-bayat*) bagi setiap muslim kapan dan dimana pun. Sayyid Quthb menempatkan syariat dalam posisi sentral dalam negara Islam dan hukum

legislasi syariat itu hanyalah milik Tuhan, yang bersumber pada kalimat tauhid “la ilaha illa Allah”. Dengan tema sentral “pandangan-Dunia Islam” (al-tashawwur al-Islami), Quthb memperkenalkan enam prinsip ideologi Islam, yaitu ketuhanan Allah (*Rabbaniyah*), keesaan Tuhan (*tauhid*), ketetapan (*tsabat*), kesempurnaan (*syumul*), keseimbangan (*tawazun*), kepastian (*ijabiyah*), dan pragmatism (*waqi'iyah*) yang seluruh sumbernya adalah Tuhan dan inilah yang membedakan dengan idiologi-idiologi buatan manusia (Quthb, 1992): 92). Sayyid Quthb dikenal sangat konsisten dalam menegakan negara Islam (*darul Islam*), bahkan baginya Jahiliyah adalah pemerintahan yang hukum dan sistemnya bukan menggunakan sistem Islam.

Pandangan mengenai negara Islam ini pula disuarakan oleh seorang pemikir Abul A'la Al Maududi. Al Maududi mengakui adanya negara Islam sebagaimana pernyataan-pernyataan kitab suci Al-Qur'an dan praktik Rasulullah serta para khulafa Al-Rasyidin. Karakteristik utama negara Islam menurut Maududi ialah sebagai berikut : (1) Tuhan adalah sumber utama kedaulatan negara, bukan manusia; (2) Tuhan adalah sumber hukum sejati dan sumber wewenang negara, kaum Muslim tidak dapat berlindung pada legislasi yang sepenuhnya mandiri; (3) Suatu negara Islam dalam segala hal didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah, pemerintah diberi hak untuk ditaati sepanjang taat kepada hokum Allah itu, jika melanggarnya maka tidak ada lagi ikatan ketaatan bagi kaum Muslim kepada pemerintahnya (Al Maududi, 1995: 158). Sifat negara Islam menurut Maududi universal, menyeluruh, dan bersifat idiologis artinya segenap pendukung dan penyelenggara negara harus meyakini serta menjunjung tinggi idiologi Islam dan hukum Islam.

Impian konsep Negara Islam (Daulah Islamiyah) selanjutnya sangat keras disuarakan oleh Hizbut Tahrir, sebuah gerakan Islam yang dicetuskan oleh seorang ulama dari Palestina, Taqiyyudin An Nabhani pada tahun 1953 di Al Quds, Palestina (Abdurahman, 2005: 35). Hizbut Tahrir berpandangan bahwa “Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem Khilafah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islamiyah (Hizbut Tahrir Indonesia, 2002: 70). Oleh karena itu, Hizbut Tahrir bergerak untuk mewujudkan Daulah Islamiyah (Negara Islam) dalam format negara Khilafah atau Khilafah islamiyah. Gerakannya mengajak kaum Muslim untuk kembali hidup secara islami di *darul Islam* (Negara Islam) dan dalam masyarakat isalm. Seluruh aktivitas dalam Darul Islam dan masyarakat islam itu diatur dengan hokum syara' (syariat islam). Pandangan hidup yang menjadi pusat perhatiannya ialah halal dan haram dibawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum Muslim yang menjalankan pemerintahan

berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, juga untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Konsep negara Islam di Timur Tengah sesungguhnya mengalami ketegangan yang luar biasa dan tidak menemukan titik temu. Fenomena Pakistan cukup menarik, bahwa berdirinya Pakistan tahun 1947 dan kemudian menjadi Negara Republik Islam Pakistan berdasarkan Konstitusi pertama tahun 1956, diwarnai pergumulan yang panas antara kalangan Muslim Modernis dan konservatif mengenai pemaknaan dan aktualisasi hubungan Islam dan politik. Kendati bangunan dasarnya negara Islam, dari segi konstitusi Pakistan berdasarkan hukum Islam, tetapi pembangunannya menggunakan model barat, warisan dari penjajahan Inggris. Namun, negara ini penuh dengan gejolak politik sejak pemerintahan Ayub Khan (1958-1969), Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977), Jenderal Zia Ul Haq (1977-1988), hingga Benazir Bhutto (1988-1990, 1993-1996), yang memperlihatkan kesaling terkaitan antara Islam dan politik negara serta konflik interpretasi kaum modernis versus kaum tradisional mengenai bagaimana peran Islam yang tepat dalam kehidupan masyarakat (Elposito, 1987: 12).

Sementara di Arab Saudi, negara yang jauh lebih dahulu menjadi negara Islam dengan sistem kerajaan tetapi mengambil model negara-bangsa sejak tahun 1932, merupakan aliansi antara paham wahabiyyah dan Dinasti raja Muhammad bin Sa'ud, yang menampilkan representasi Islam yang kaku. Islam adalah asas ideologis kerajaan Arab Saudi, sedangkan Al-Qur'an sebagai konstitusi dasarnya, dan negara dikelola dengan sistem peradilan syariat dengan para hakim dan penasihat hukumnya para ulama. Kerajaan Arab Saudi menjustifikasi dan merasionalisasikan diri dengan menunjukan raja taat kepada syariat Islam (Nashir, 2013:146).

Islam dimanfaatkan keluarga Sa'ud untuk kepentingan di dalam maupun luar negeri. Namun, interpretasi dan pembenaran keagamaan digunakan untuk melarang partai politik dan sarikat dagang, yang menunjukkan sikap tidak Islami. Bahkan ketika terjadi konflik dengan Iran, Khomeini tidak henti-hentinya mengecam Arab Saudi dan pemerintah-pemerintah jazirah Teluk sebagai pemerintahan tidak Islami, dan menunjuk hubungan militer serta ekonomi Arab Saudi dengan Amerika Serikat sebagai "Islam Amerika". Dengan kata lain, Arab Saudi sebagai Negara Islam berdasarkan Al-Qur'an dan syariat Islam, melalui sistem kerajaannya tidak kebal dari tantangan-tantangan tentang legitimasi dan kepemimpinannya, baik di dalam maupun luar negeri. Kalangan Al-Qaida, bahkan menuding Arab Saudi dengan kalim negara kerajaan Islam-nya itu, tidak menerapkan syariat Islam secara adil, bahkan terdapat diskriminasi antara penerapan syariat untuk rakyat kebanyakan dengan kalangan kerajaan, disamping pada praktiknya juga mengembangkan hukum positif, sehingga bagi usmah bin

Ladin Kerajaan Arab Saudi telah mengalami delegitimasi secara syar'i (Al Maqdisi, 2005: 23).

Dari pemaparan panjang lebar mengenai kondisi geo politik Timur Tengah, kita akan menemukan suatu kesimpulan bahwa Islam di Timur tengah tidak sanggup melakukan perkawinan antara Islam dan Nasionalisme, Agama dan Kenegaraan. Terjadi duel yang cukup alot hingga kini, yakni di satu sisi adalah paham Negara islam (*Daulah Islamiyah*) atau *darul Islam* dan pada sisi lain adalah nasionalisme yang berangkat dari tradisi Barat. Sehingga tidak jarang pertumpahan darah terjadi karena ketegangan dua kubu tersebut.

Islam dan Nasionalisme Di Indonesia

Seperti terlihat dari asal katanya, nasionalisme berasal dari kata *naita* atau *naitas* yang berarti tempat kelahiran. Berbicara mengenai kebangsaan berarti berbicara tentang tanah kelahiran. Tetapi secara perlahan, kata *nation* digunakan sebagai suatu konsep dalam ilmu sosiologi dan politik, dengan pengertian yang lebih luas. Dalam ilmu politik misalnya, kata ini dipakai untuk menunjuk pada penduduk dalam suatu wilayah geografis yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang sama. Pada saat yang sama, kata ini dipakai juga untuk menunjuk pada adanya identitas yang sama. Konsep yang diasosiasikan dengan *nation* adalah negara (*state*), yang biasanya juga menunjuk pada wilayah teritorial atau tanah di mana bangsa itu dihubungkan.

Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang dipadankan dengan bangsa. bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian antropologis serta sosiologis, dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat (Yatim, 1999: 57-58). Sedangkan yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi.

Sedangkan menurut Ernest Renan, nasionalisme merupakan unsur yang dominan dalam kehidupan sosial-politik sekelompok manusia dan telah mendorong terbentuknya suatu bangsa guna menyatukan kehendak untuk Bersatu (Daud, 2003: 3). Berangkat dari definisi Renan ini, maka Nasionalisme sesungguhnya merupakan sikap dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu bangsa dan negara sesuai dengan konsensus atau kesepakatan warga bangsa. Untuk hidup bersama dalam waktu yang lama, negara-bangsa memerlukan sebuah kesepakatan (*konsensus*) sehingga dapat merekatkan ikatan negara-bangsa tersebut.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama untuk hidup bersama dalam ikatan luhur yang mempersatukan.

Dalam perjalanan sejarah Republik ini mengenai Pancasila sebagai idiologi Negara, muncul rumusan sila pertama Pancasila “Ketuhanan” dengan tambahan *dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* yang dikenal dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada tanggal 18 Juni 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) rumusan tersebut diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” setelah ada protes dari AA Maramis dan para utusan Indonesia Timur bahwa kalimat “syariat Islam” bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Sebelum sidang dimulai Moh. Hatta memanggil empat anggota PPKI yang dianggap mewakili Islam: Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), Teuku Mohamad Hasan (Aceh) dan Kiai Wahid Hasyim (NU). Sebagai gantinya Kiai Wahid Hasyim mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, penambahan kata Esa menggarisbawahi keesaan Tuhan (Tauhid) yang tidak terdapat pada agama-agama lain. Setelah persetujuan tokoh tersebut, draft itulah yang dibawa ke sidang PPKI dan disahkan.

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan sikap arif tokoh-tokoh Islam saat itu dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Kejadian ini mirip dengan peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Saw saat Perjanjian Perdamaian Hudaibiyah (*Sulh Hudaibiyah*). Draft perjanjian yang ditulis oleh Imam Ali ditolak oleh pemuka-pemuka Quraisy karena ada kalimat “bismillahirrahmanirrahim” dan “Muhammad Rasulullah”, mereka meminta kata “bismillahirrahmanirrahim” dan “rasulullah” dihapus diganti dengan Muhammad bin Abdillah.

Inilah yang menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, penerimaan Pancasila sebagai dasar filosofis partai atau organisasi kemasyarakatan pernah dipaksakan, tetapi setelah dikaji dalam konteks kultur Indonesia, sampai sekarang tidak ada konsep lain yang tepat secara rasional dapat mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa, kecuali lima dasar itu, tetapi yang harus dibaca dalam satu-kesatuan (Ma'arif, 2009: 23).

Dalam konteks lain, ketegangan Islam dan Nasionalisme atau Agama dan Negara juga terjadi. Ketegangan Islam dan negara, bisa terlihat dari misalnya, pandangan Muhammad Natsir mengenai hubungan agama dan negara. Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelaskan pandangan Natsir : Kemudian dalam pidatonya didepan Majelis Konstituante pada tahun 1957, Natsir mempertegas kembali dan menjelaskan lebih lanjut pendiriannya tentang hubungan Islam dan Negara, Natsir berdalil bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme (*la-diniyah*) atau faham agama (*dini*). Dan Pancasila menurut

pendapatnya bercorak *la-diniyah*, karena itu ia sekuler, tidak mau mengakui wahyu sebagai sumbernya. Pancasila adalah hasil penggalian dari masyarakat (Ma'arif, 2006: h.129).

Sebuah pandangan yang cukup mengkhawatirkan bagi sebuah negara yang saat itu sedang mendambakan dasar negara, Pancasila, yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Namun, kaitan dengan demokrasi, Natsir sesungguhnya adalah seorang democrat sejati, yang meyakini bahwa demokrasi merupakan jalan terbaik bagi umat Islam dalam merumuskan dan menggapai cita-cita idealnya. Natsir pernah menjadi menteri dan perdana menteri setelah Indonesia merdeka. Bahkan, ketika Presiden Soekarno mengarah pada tindakan diktator, Natsir segera mengeluarkan kritiknya, sebagai berikut:

Adalah keyakinan kami yang pasti bahwa intitusi-intitusi demokrasi di Indoensia punya landasan yang cukup kukuh untuk mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Adalah pasti bahwa demokrasi di Indonesia dapat memberikan penyelesaian bagi persoalan-persoalan kami, asal partai-partai politik siap untuk mengemban tanggung jawabnya. Potensi masih cukup dikalangan rakyat Indonesia – dalam partai ataupun diluarnya- yang bila diterapkan secara realistis akan dapat mengerjakan semua yang diperlukan bagi pemulihan kepercayaan yang penuh terhadap demokrasi (Ma'arif, 2006: 133-134).

Natsir juga menganggap nasionalisme gagasan Soekarno mengarah pada *ashabiyah*, yang bisa memutuskan hubungan muslim antar bangsa. Baginya, nasionalisme harus memiliki pijakan teologis, yaitu bersandar kepada agama dan ketuhanan, bukan sekedar orientasi materialisme belaka. Perjuangan pergerakan kemerdekaan merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah. Utuk itu nasionalisme Indonesia haruslah berwatak Islam dengan konsep Kebangsaan Islam-nya, karena secara historis yang pertama mendefinisikan nasionalisme Indonesia adalah islam melalui pergerakan Islam yang dilakukan oleh Syarikat islam (SI). Maka, bagi gerakan nasionalis Islam, kemerdekaan Indonesia bukan tujuan akhir, tapi sebagai jalan menuju sebuah negara yang berdasarkan hokum kenegaraan Islam (Effendi: 81-82).

Penegasan itu Nampak pada tulisannya dalam jurnal *pembela Islam*.¹

1. *Pergerakan Islamlah (yakni SI) yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah ini, yang mula-mula menanamkan bibit persatuan Indonesia*

¹Jurnal *pembela Islam*, No. 36, Oktober 1931 dikutip dari deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, h. 260, No 41, Januari 1932 dikutip dari Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, h.263, No 42, Januari 1932 dikutip dari Howard Federspiel, *Persatuan Islam*, h.89, dalam Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*.

- yang menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama senasib diluar batas Indonesia dengan tali keislaman (Pembela Islam, No 36, Oktober 1931)*
2. *Kalau begitu, baik dari sekarang, kita berpahit-pahit. Sebab tak sama arah tujuan kita! Tuan mencari kemerdekaan Indonesia untuk bangsa Indonesia, karena Ibu Indonesia. Kami mencari kemerdekaan, karena Allah untuk keselamatan segenap penduduk kepulauan Indonesia ini. (Pembela Islam, No 41, Januari 1932)*
 3. *Tanpa Islam, maka nasionalisme Indonesia itu tidak akan ada; karena Islam pertama-tama telah menanamkan benih-benih persatuan Indonesia, dan telah menghapuskan sekat-sekat isolasionis pulau-pulau yang beragama (Pembela Islam, No 42, Januari 1932.*

Setidaknya ada empat pokok pikiran Natsir. *Pertama*, Islam sebagai idiologi kenegaraan, karena Islam sangat luas mengatur segala dimensi kehidupan manusia. Penolakan terhadap pemikiran sekuler menjadi keniscayaan, sebab itu sama saja dengan pengingkaran terhadap nilai-nilai trasendental. Kedua, gagasan persatuan adgama dan negara sebagai negara Islam, namun Natsir menyangkan pemahaman kaum nasionalis sekuler yang memahami negara Islam sebagaimana artikulasi yang muncul dari para orientalis. Ketiga, negara sebagai alat untuk merealissasikan hukum-hukum Islam, dengan pendekatan legal formal. Dan keempat, Natsir tidak terjebak menggolongkan apakah gagasan negara islam-nya tergolong kedalam bentuk teokraasi atau demokrasi. Bentuk apapun-teokrasi maupun demokrasi- yang terpenting baginya adalah sisitem kenegaraan yang seluruh produk peraturan hukumnya bersumber dari hukum-hukum Allah (Suhelmi, 2002: 112-134)

Sementara itu, muncul pula semangat membentuk *Darul Islam* (Negara Islam). Di Indonesia kata-kata *Darul Islam* digunakan untuk menyatakan gerakan-gerakan sesudah 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita *Negara Islam Indonesia*.² *Darul Islam* mengartikan gerakannya sebagai satu-satunya gerakan yang menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* (Al-Chaidar, 1998: 76).

Darul Islam (DI) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Negara Islam Indonesia” (NII) dan bisa disebut juga dengan “N sebelas”, adalah kelompok orang-orang yang ingin membentuk sebuah negara yang berdasarkan Islam (Afadlal,dkk, 2005: 226). Berbicara tentang Darul Islam maka tidak akan lepas dari sosok S.M. Kartosuwirjo. Ia adalah imam yang memimpin gerakan Darul Islam selama bertahun-tahun. Perjuangannya didasari keinginan untuk membentuk Indonesia menjadi Negara Islam, bukan Negara sekuler. Oleh karena itu ia banyak bertentangan dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno.

Padahal Soekarno dan Kartosuwirjo merupakan murid dari H.O.S Tjokroaminoto yang pernah mondok di rumahnya.

Ketegangan antara Islam dan nasionalisme atau Agama dan negara melalui penerimaan terhadap Pancasila yang telah dibahas tadi, mencapai titik temu melalui pandangan-pandangan para kyai-kyai Nusantara. Menurut Andre Feillard, kyai-kyai NU tidak menuntut dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 demi piagam Jakarta, namun lebih pada penjabaran Dekrit 5 Juli 1959 secara Islami. Ia tidak mempertentangkan Pancasila dan Piagam Jakarta seperti ketika dalam majelis Konstituante, melainkan memadukan keduanya (Feillard, 2009: 112). Titik temu antara Islam dan Nasionalisme yang dilakukan oleh NU tersebut, tidak terlepas dari pandangan sang pendiri Nahdhatul Ulama yakni KH Hasyim Asy'ari. Dalam posisinya sebagai tokoh Islam dan Masyumi, beliau menyampaikan pidato yang isinya adalah mengharmoniskan antara Islam dan Nasionalisme. Sebagaimana dikutip Abu Bakar Atjeh, yaitu; *Pertama*, menyiapkan umat Islam Indonesia agar cakap dalam menerima kemerdekaan NKRI dan kemerdekaan agama Islam. *Kedua*, menggiatkan segenap umat Islam Indonesia guna mempercepat tercapainya kemenangan dan menolak tiap-tiap rintangan dan serangan musuh, yang dapat mengurungkan datangnya kemerdekaan NKRI dan kemerdekaan agama Islam. *Ketiga*, Berjuang luhur bersama-sama, dan lebur bersama-sama Dai Nippon di jalan Allah untuk membinasakan musuh yang *dzalim* (Atjeh, 1957: 341). Inilah kontribusi nyata para Ulama' Nusantara dalam mengharmoniskan antara Islam dan Nasionalisme, sehingga nilai-nilai nasionalisme (kebangsaan) merupakan bagian dari semangat melaksanakan ajaran Islam. Spirit inilah sesungguhnya yang menjadi substansi dari gagasan *Islam Nusantara*.

Islam Nusantara: Islam dan Nasionalisme Sebuah Konsep Aplikasi

Konsep Islam Nusantara

Islam Nusantara adalah cara muslim yang hidup di Nusantara di era sekarang ini dalam menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, bukan hanya dalam wilayah *'ubudiyah* tapi juga *muamalah* dan *awaid*. Dalam domain *'ubudiyah* aturannya bersifat permanen (*al-tsawabit*), tak memberi tempat bagi inovasi. Sedang dalam wilayah *muamalah* dan *'awaid*, aturannya bersifat fleksibel dan dinamis (*al-muthabayyirah*), seiring dengan dinamika perubahan ruang dan waktu, dengan tetap berproses pada kemaslahatan. Mereka menghargai konteks local dan semangat zaman untuk memastikan bahwa masalah sebagai tujuan syariah betul-betul membumi.

Dialektika antara teks syariat dan konteks budaya Nusantara dengan berpatokan pada prinsip masalah pada gilirannya melahirkan wawasan dan orientasi politik yang substantif. Islam tidak dipahami melalui pendekatan legal-formalistik atau membenturkannya dengan realitas secara frontal, melainkan luwes dan fleksibel. Ini terlihat pada penerimaan NU dan Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila sebagai sistem politik yang bukan hanya tak bertentangan dengan syari'at, melainkan justru dianggap sebagai sistem yang syar'i dan Islami.

Simak, misalnya, argument fikih yang dibangun KH Sahal Mahfudz dalam menerima system demokrasi dan faham kebangsaan. Menurut KH Sahal, muara fikih adalah terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Dasarnya diantaranya adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib: "Kekuasaan, negara, bisa berdiri tegak dengan keadilan meskipun *ma'a al-kufri* (di tangan orang kafir) dan negara itu akan hancur dengan kedzaliman meskipun *ma'al muslimin* (dia tangan orang Muslim) " dan Ibnu taimiyah, " Allah akan menegakan negara yang adil meskipun (negara) kafir dan Allah akan menghancurkan negara yang zalim meskipun (negara) muslim" (Sahal (ed), 2015: 111).

Dalam konteks modern, keadilan sosial dimaknai dalam kerangka modern, keadilan sosial dimaknai dalam kerangka demokrasi, yang bertaut erat dengan prinsip kesetaraan warga negara, apa pun agamanya. Kesetaraan demokrasi inilah yang menurut Kiai Sahal merupakan muara bagi fikih politik untuk zaman ini. Konsekuensinya, dictum-diktum fikih politik (*fiqh al-siyasah*) klasik yang bertentangan dengan muara fikih tersebut, seperti konsep dzimmi yang menempatkan kalangan non-muslim sebagai warga negara kelas dua, menjadi tidak relevan lagi.

Dengan kerangka berfikir seperti itu, wajar kalau kemudian Kiai Sahal menolak ide formalisasi syariat. Dalam pidato iftitahnya di Munas NU 2006, misalnya, ia menggarisbawahi perlunya NU mengusung syariat " tanpa melalui jalan formalistic, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara frontal, melainkan dengan cara lentur". Sebab ia meyakini, "syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui intitusi formal".

Penerimaan Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila juga merefleksikan suatu bentuk penerapan syariat yang lentur. Setidaknya ini ditunjukkan oleh Din Syamsudin yang melihat Negara Pancasila sebagai negara perjanjian (*Dar al-'Abdi*) dan juga Negara kesaksian/pembuktian (*Dar al-Syahadah*). Dalam pandangan Ketua Umum Muhammadiyah ini, Negara Pancasila ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara segenap rakyat warga negara yang mengikat segenap warga negara, termasuk kalangan muslim, dari generasi ke generasi dalam gerak melintasi zaman. Ini karena para tokoh Islam yang mewakili berbagai kelompok Islam pada siding PPKI waktu itu

menyepakati bahwa NKRI berdasarkan Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bahkan bersifat Islami.

a. Pancasila Sebagai Basis Ideologis Islam Nusantara

Pancasila dan UUD 1945 adalah basis kekuatan Islam Nusantara dalam konteks keindonesiaan. Dimulai dari rumusan tidak adanya pertentangan antara Islam dan Pancasila, bahkan dinyatakan, sila-sila dalam Pancasila merupakan ajaran Islam, maka menerima, menjalankan dan membela Pancasila dihitung sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam. Pancasila juga bisa dianggap sebagai produk Islam Nusantara, karena sila-sila dalam Pancasila merupakan akulturasi ajaran Islam dengan budaya, bahasa, dan prioritas yang berasal dari konteks.

Kalau Islam disebut sebagai dasar negara, maka, golongan-golongan di luar Islam dipastikan akan menentang, imbasnya adalah persatuan dan keutuhan bangsa terancam. Oleh karena itu ajaran-ajaran Islam perlu dibahasakan kembali, dirumuskan, disesuaikan dengan budaya dan prioritasnya dengan konteks lokal. Dengan Pancasila, Islam Nusantara berbeda dari kelompok-kelompok Islam yang anti Republik Indonesia Pancasila dan UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (Romli, 2016: 114).

Demokrasi Sebagai Basis Sosial dan Kultural Islam Nusantara

Tidak ada sistem politik dan kekuasaan yang diakui keabsahannya oleh dunia selain demokrasi untuk saat ini. Demokrasi juga bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah umat Islam Indonesia. Dari sebelum hingga Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi menunjukkan kemenangan demokrasi, dari lawannya, rejim otoritarianisme. Demokrasi mengenalkan kemajemukan dan perbedaan berpikir. Kalau kita membaca sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)/PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) perdebatan-perdebatan tentang dasar negara sangat intens. Namun akhirnya sikap dan prinsip yang demokratis yang terpilih, untuk memelihara kemajemukan Indonesia dan memperkuat persatuan.

Demokrasi adalah kekuatan bagi Islam Nusantara, dan Islam Nusantara sesuai dengan demokrasi, karena Islam Nusantara mampu menampilkan keragaman dan kemajemukan, juga pola pikir Islam Nusantara seperti tasamuf (toleran), tawassuth (moderat), *tawazun* (berimbang), *i'tidal* (tegak, konsisten).

Rujukan tertua soal pendapat terhadap sistem politik di Indonesia pada era modern adalah Keputusan Mukhtar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1935 yang menjelaskan tentang definisi Negara Islam (Darul Islam). Menjawab

pertanyaan yang diajukan dari muktamirin (yang hadir di muktamar), apakah negeri Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda masih bisa disebut “Negara Islam”? Keputusan Muktamar waktu itu menjawab “masih termasuk Negara Islam” dengan dua alasan yang dikutip dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin pertama*, karena umat Islam masih bisa mempraktikkan ajaran-ajaran (syariat Islam) dan *kedua* dulunya Indonesia pernah dikuasai oleh Kerajaan-Kerajaan Islam (*Abkamul Fuqaha*, Hasil-Hasil Keputusan Muktamar NU Sejak Tahun 1926). Intinya dari hasil Muktamar itu, memberikan definisi “negara Islam” yang sangat longgar, tidak seperti tuntutan negara Islam seperti yang diperjuangkan oleh kaum “Islamis”. Dengan demikian, seperti yang disimpulkan oleh Gus Dur, sejak awal, umat Islam di Indonesia, tidak membutuhkan “Negara Islam”.

Urgensi dan Karakteristik Islam Nusantara

Dengan semakin berkembangnya kalangan Islam puritan yang mengusung ideologi yang sama sekali berbeda dengan Islam Nusantara, patut dipertanyakan bagaimanakah masa depan Islam Nusantara yang menjadi *mainstream* di tengah “kepungan” faksi Islam puritanis yang semakin mendapat tempat di ruang publik?. Di tengah “ancaman” yang semakin serius itu, masih terdapat harapan bahwa Islam Nusantara tetap akan menjadi corak dominan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, berdasarkan hal-hal berikut ini (Muhammad, 2008: 45.

Pertama, puritanisme dalam arti paham yang ekstrem, keras, kejam, garang dan radikal tidak cocok bagi kehidupan masyarakat Muslim Indonesia yang secara umum memiliki karakter keagamaan yang moderat, toleran dan akomodatif. Persatuan Islam (Persis) adalah contoh kecil yang dapat dijadikan cermin, meskipun tetap bertahan hingga kini, perkembangan kelompok yang paling puritan di antara penganut paham Wahabi awal ini dapat dikatakan jalan di tempat dan tidak menunjukkan prestasi yang fenomenal. Ini berbeda dengan Muhammadiyah yang – meskipun sama-sama penganut paham Wahabi—lebih moderat dan relatif mampu beradaptasi dengan perkembangan.

Kedua, konstitusi negara kita tidak memberi kesempatan bagi berdirinya Negara Islam sebagaimana dicita-citakan oleh kalangan kelompok puritanis. Akomodasi negara terhadap aspirasi kelompok ini, paling jauh, hanya sebatas Peraturan Daerah (Perda) yang sering diidentifikasi sebagai “Perda Syari’at”. Ini pun jangkauannya terbatas, cenderung tidak efektif dan bahkan sering dijadikan alat “komoditas politik”. Misalnya penerapan Perda Syariah di Bulukumba Sulawesi selatan dan di berbagai daerah lainnya. Perdaisasi Syariah Islam di Bulukumba dan mungkin saja di daerah-daerah lainnya menjadi semacam alat untuk menggapai kepentingan politik. Disamping itu, Perdaisasi Syari’at ini kerap

kali tidak toleran terhadap tradisi lokal yang telah dipraktikkan secara turun temurun (Adhan dan Zubair Umam, 2006: 77).

Ketiga, kelompok Islam tradisional memiliki sejumlah pranata yang menjadi penopang bagi keberlangsungan dan kebertahanan ajaran dan praktik keagamaan mereka, yaitu pesantren (Siraj, 2015: 3). Pesantren inilah yang telah mampu melahirkan tokoh-tokoh dan ulama Nusantara yang memiliki watak *tasamub* (lapang dada), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil).

Dalam konteks demikian, pesantren sebagai penopang dan jangkar Islam Nusantara penting melakukan pengokohan-pengokohan dalam hal: *pertama*, *tamaddun* yaitu merancang bangun pesantren sebagai model pendidikan yang terbuka, baik secara keilmuan maupun kemasyarakatan. *Kedua*, *tsaqafah*, yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat agar kreatif-produktif sehingga pesantren mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang bermanfaat dalam spektrum ke-Indonesiaan. *Ketiga*, *hadharah* membangun budaya. Di sini pesantren diharapkan mampu melestarikan dan mengembangkan tradisi adiluhung (*wrf al-Shahib*) di tengah pengaruh dahsyat globalisasi yang mampu menyeragamkan budaya melalui produk teknologi.

Berangkat dari konsep inilah, substansi *Islam Nusantara* begitu sangat urgen dalam konsteks berbangsa dan bernegara saat ini. Mengingat substansi gagasan *Islam Nusantara* sesungguhnya berangkat dari tradisi Islam *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (Aswaja) para pendahulu sebelumnya yang melakukan upaya menengahi ketegangan pada setiap konteks saat itu. Imam Syafi'i sebagai sumber Aswaja, telah berhasil mengharmoniskan antara akal dan wahyu melalui perumusan *ushul fiqh*. Begitupun dengan Imam Al-Ghazali, yang telah berhasil mengharmoniskan pertentangan antara Syariat dan Hakikat atau Fiqih dan tasawuf melalui karya monumentalnya *Ihya' Ulumuddin*. Inilah yang menjadi sumber dari karakteristik *Islam Nusantara*.

Karakter Aswaja yang toleran dan akomodatif mengerucut dalam sikap *tawassuth* atau *wasathiyah*, yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai moderasi. Menurut KH Afifudin Muhajir, *wasathiyah* sebenarnya memiliki arti lain, yakni *al-waqi'iyah*/realistis. Ini bukan sikap pasrah dan menyerah pada keadaan, melainkan mempertimbangkan kenyataan yang ada dan tidak bersikap mutlak-mutlakan, tapi sambil tetap berusaha untuk menggapai keadaan ideal (Muhajir, Meneguhkan *Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia dan Dunia* (Muhajir, 2005).

Posisi *waqi'iyah* ini banyak kita temukan rujukannya dalam kaidah-kaidah fikih. Misalnya kaidah fikih yang berbunyi *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* (apa yang tak bisa diperoleh semuanya tak lantas ditinggalkan semuanya). Juga

kaidah tentang keharusan menghilangkan kerusakan (*dharar*), baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kaidah lain yang cocok sebagai contoh adalah *al-dharurah tubihu al-mahdzurat* (keadaan tak terelakkan atau suatu kemestian (*dharurah*) bisa membolehkan hal yang tadinya terlarang). Kaidah inilah yang dipakai, misalnya oleh Al-Ghazali sebagai landasan fikih politiknya yang bertumpu pada realisme. Dalam *al-iqtishad fi al-Itiqad* sebagaimana dikutip Akhmad Sahal, Al-Ghazali menegaskan, dalam situasi ketika tidak mungkin lagi ditemukan pemimpin yang sesuai dengan kriteria syariat, maka penguasa yang tak sesuai kriteria syariat bisa dianggap *abash*, asalkan mampu menegakkan tatanan sosial.

Alhasil, Islam Nusantara merupakan gagasan hasil dari warisan khazanah intelektual Islam yang akomodatif, jalan tengah, moderat dan toleran. Sehingga Islam Nusantara bukanlah Madzhab dan aliran baru, tetapi merupakan gagasan mengembalikan dan mengingatkan kembali kepada ummat Islam Indonesia akan ciri khas Islam di Nusantara yang telah dibangun dan disebarkan oleh para Ulama Nusantara.

SIMPULAN

Islam Nusantara adalah cara muslim yang hidup di Nusantara di era sekarang ini dalam menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, bukan hanya dalam wilayah *'ubudiyah* tapi juga *muamalah* dan *amaid*. Pancasila dan UUD 1945 adalah basis kekuatan Islam Nusantara dalam konteks keindonesiaan. Dimulai dari rumusan tidak adanya pertentangan antara Islam dan Pancasila, bahkan dinyatakan, sila-sila dalam Pancasila merupakan ajaran Islam, maka menerima, menjalankan dan membela Pancasila dihitung sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam.

Berangkat dari konsep inilah, substansi *Islam Nusantara* begitu sangat urgen dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini. Mengingat substansi gagasan Islam Nusantara sesungguhnya berangkat dari tradisi Islam *Ablu Sunnah wal Jama'ah* (Aswaja) para pendahulu sebelumnya yang melakukan upaya menengahi ketegangan pada setiap konteks saat itu. Karakter Aswaja yang toleran dan akomodatif mengerucut dalam sikap *tawassuth* atau *wasathiyah*, yang sering diterjemahkan sebagai moderasi atau moderasi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sahal (ed), *Islam Nusantara; Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis* (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015)
- Andre Fiellard, NU; *Vis a Vis Negara; Pencarian Isi, bentuk dan Makna*, (Yogyakarta, LKiS, 2009),
- Abubakar Atjeh, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Penerbitan Buku Peringatan Alm. K.H. A. Wahid Hasyim, 1957),
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara; Studi tentang perdebatan dalam konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 2006),
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung, Mizan Pustaka, 2009),
- Haedar Nashir, *Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia* (Bandung, Penerbit Mizan, 2013),
- Mohammad Guntur Romli, *Islam Nusantara ; Lima Dasar Islam Nusantara*, (Jakarta, Ciputat School, 2016)
- Said Aqil Siraj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddun*. (Jakarta: LTN NU, 2015).
- Z. A. Ahmad, *membentuk negara Islam* (Jakarta; Penerbit Widjaya, 1956).